

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TER-PHK DAN MENGGANGGUR

(STUDI DI KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH)



PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19, telah berimbas pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Tenaga kerja ter-PHK memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Pemerintah telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan tenaga kerja ter-PHK dan menganggur di wilayahnya. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan tenaga kerja yang terancam PHK. Kurangnya koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dari pusat sampai daerah mengakibatkan belum tercapainya sinergi yang baik, sehingga upaya perlindungan belum optimal.

TUJUAN

Untuk menganalisis masalah perlindungan tenaga kerja ter-PHK dan menganggur

Desain penelitian

Pengumpulan data ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data (studi dokumen, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD)), dan teknik analisis isi. Pengumpulan data dilaksanakan tanggal 14-18 Maret 2022 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan tanggal 18-22 April 2022 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

UPAYA PEMERINTAH



Kartu Prakerja



BSU



BLT



Pelatihan



JHT



JKP

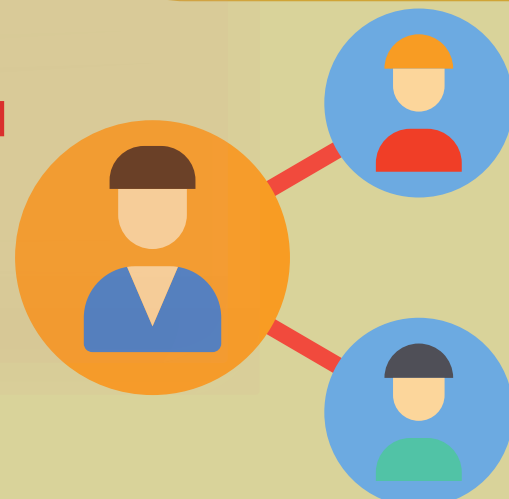
KLAIM JHT OLEH TENAGA KERJA TER-PHK 2019-2021

TAHUN	JABAR	JATENG
2019	104.295	44.194
2021	135.671	27.464
2022	161.102	31.688

KESIMPULAN



Lemahnya kinerja lembaga penyelesaian data



Telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka memberikan perlindungan bagi tenaga kerja ter-PHK dan menganggur. Melalui program jaminan sosial tenaga kerja dan bantuan sosial, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penelitian ini merekomendasikan :

- Perlu koordinasi lebih baik terkait sinkronisasi data, kesamaan persepsi tentang peraturan pelaksanaan program perlindungan tenaga kerja, dan sharing peran/tugas.
- Perlu koordinasi lebih intens dengan lembaga BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan/pengusaha, dan serikat pekerja.

- Perlu diskusi pemahaman penegakan hukum ketenagakerjaan.
- Perlu sosialisasi lebih luas dan komprehensif terkait Program JKP dan JHT
- Perlu dukungan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan programnya sendiri dalam rangka melindungi tenaga kerja ter-PHK dan menganggur di wilayahnya.

Hasil Pengumpulan Data Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI 2022

PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Tim Peneliti: Hartini Retnaningsih | Yulia Indahri | Luthvi Febryka Nola | Elga Andina | Efendi